BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Komitmen pemerintah yang berupaya untuk mengurangi ketergantungan pembangunan terhadap bantuan luar negeri begitu besar. Pemerintah lebih memfokuskan diri pada sumber pendanaan pembangunan dari dalam negeri dibandingkan sumber pendanaan dari luar negeri, baik dalam bentuk pinjaman maupun bantuan, Bantuan luar negeri tersebut lebih diarahkan untuk memenuhi berbagai keperluan lain. Dampak dari upaya tersebut adalah perlunya mencari sumber lain dalam pendanaan pembangunan. Salah satu sumber itu adalah melalui kebijakan fiskal yaitu dengan meningkatkan optimalitas penerimaan pajak. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial, sektor Pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.(Agus Dwi Darmawan:2010)

Sebagai salah satu sektor sumber utama penerimaan negara maka pajak mempunyai peranan penting bagi kelangsungan pembangunan Negara ini, Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dari sumber migas maupun non migas, dengan posisi yang demikian maka harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan lancar dan baik. Dari tahun ke tahun telah dilakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui

penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lain. Berbagai upaya di atas tentunya belum dapat menghasilkan peningkatan pajak yang signifikan bagi penerimaan Negara, oleh karena itu, kebijakan pemerintah di dalam pajak ini sangat penting, karena dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri. (Erlangga Djumena:2009)

Menurut Hatta Rajasa (2010) Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak, jika ekonomi meningkat, tentu pajak akan meningkat. Laju Pertumbuhan ekonomi di tahun 2011 semester 1 telah mencapai diatas 6,6 persen ini berdampak langsung pada penerimaan negara, terutama penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan dilaporkan meningkat 50,3 persen (Darmin Nasution:2011). sedangkan untuk ditahun 2012 sendiri penerimaan pajak mengalami penurunan ini disebabkan karena ditahun 2012 pemerintah menurunkan pertumbuhan ekonomi menjadi 6,5 persen sehingga berdampak pada penerimaan, selain itu besar kecilnya penerimaan perpajakan, juga ditandai oleh menurunnya pendapatan secara nasional sebagai akibat menurunnya pertumbuhan ekonomi. (Agus Martowardojo:2012). berikut ini adalah perkembangan penerimaan pajak dari tahun 2005-2010.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak di Indonesia tahun 2005 – 2010
Dalam Triliun Rupiah

Penerimaan pajak 2005-2010 (Rp triliun)						
	2005	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
Penerimaan perpajakan	347,0	409,2	491,0	658,7	652,0	742,7
a.Pajak dalam negeri	331,8	396,0	470,1	622,4	631,9	715,5
i.Pajak penghasilan	175,5	208,8	238,4	327,5	340,2	351,0
1.PPh migas	35,1	43,2	44,0	77,0	49,0	47,0
2.PPh non-migas	140,4	165,6	194,4	250,5	291,2	303,9
ii.PPN	101,3	123,0	154,5	209,6	203,1	269,5
iii.PBB	16,2	20,9	23,7	25,4	23,9	26,5
iv.BPHTB	3,4	3,2	6,0	5,6	7,0	7,4
v.Cukai	33,3	37,8	44,7	51,3	54,5	57,3
vi.Pajak lainnya	2,1	2,3	2,7	3,0	3,2	3,9
b.Pajak perdagangan Int.	15,2	13,2	20,9	36,3	20,0	27,2
i.Bea masuk	14,9	12,1	16,7	22,8	18,6	19,6
ii.Pajak/pungutan ekspor	0,3	1,1	4,2	13,6	1,4	7,6

Sumber: Depkeu(2010)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa selama 6 tahun pajak memberikan kontribusi yang besar, walaupun secara keseluruhan kontribusi tersebut cukup berfluktuasi, karena pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2009 mengalami penurunan, dan pada tahun 2010 mengalami kenaikan kembali. Kontribusi penerimaan pajak yang cukup besar dalam struktur APBN, membuat penerimaan pajak menjadi sumber pendanaan utama bagi pembangunan Negara.

Salah satu pos penerimaan perpajakan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak antara lain adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan (PPh) merupakan komponen penerimaan negara di sektor perpajakan yang memberikan kontribusi terbesar pada 2011. Dari total realisasi penerimaan pajak 2011 seberar Rp 878,7 triliun, realisasi PPh sebesar Rp 431,08 triliun. Pajak Penghasilan (PPh) menyumbang sekitar 49% lebih dari total penerimaan pajak. Penerimaan pajak penghasilan dipengaruhi beberapa factor diantaranya adalah kondisi ekonomi saat ini, seperti tingginya inflasi, pendapatan perkapital masyarakat akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.(Fuad Rachamany :2012)

Saat ini masih terdapat masalah dalam penerimaan pajak yaitu Jumlah penerimaan negara dari sektor pajak belum mencapai tax ratio yang optimal, dengan tax ratio Indonesia 12% termasuk paling rendah dibandingkan negara-negara tetangga ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam menunaikan kewajibannya, dalam kenyataannya pembayaran pajak masih banyak terdapat kelalaian, bahkan mangkir dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak terutang oleh wajib pajak tertentu. Pajak terutang yang lalai dilunasi oleh Wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Sehingga cenderung dapat berisiko untuk berkurangnya pendapatan negara yang dapat mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung. (Fuad Rahmany : 2011). Kemudian ketidakpatuhan tersebut juga dapat dilihat dari tunggakan pajak tahun 2003- 2007 dibawah ini.

Tabel 1.2
Perkembangan Tunggakan Wajib Pajak
Di Indonesia Tahun 2003-2007

Tahun Anggaran	Tunggakan Awal	Penambahan	Jumlah Tunggakan	Pencairan Tunggakan	Tunggakan Akhir
2003	13.358.845	12.166.834	25.525.679	8.220.430	17.305.249
2004	17.305.249	13.928.158	31.233.407	12.651.759	18.581.648
2005	18.581.648	11.852.334	30.433.982	10.775.215	19.658.767
2006	19.658.767	21.862.337	41.521.104	15.626.189	25.849.915
2007	25.849.915	20.302.969	46.197.884	19.621.830	25.576.054

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2008)

Dari tabel diatas dapat di lihat terjadi permasalahan yang berdampak pada penerimaan pajak. Dengan tunggakan yang cenderung meningkat dari tahun 2003-2007 dan jumlah pencairan tunggakannya yang jumlahnya hanya sebagian dari jumlah keseluruhan tunggakan pajak akan mengakibatkan terhambatnya penerimaan pajak dan tiap tahunnya penambahan tunggakan pajak pun semakin meningkat hingga ± 80% dari tunggakan awal.

Pernyataan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Mochamad Tjiptardjo mendukung fenomena tunggakan pajak dengan mengungkapkan sampai dengan September 2009 ini tunggakan pajak BUMN mencapai Rp19 triliun. selain BUMN, tunggakan pajak dari para wajib pajak lainnya mencapai Rp22 triliun. Ia mengancam akan akan mengumumkan namanya di media massa bagi mereka yang tidak segera membayar tunggakannya. Dengan pencairan tunggakan pajak sebesar Rp41 triliun tersebut, maka dapat menambah penerimaan pajak yang cukup signifikan untuk menggapai target penerimaan Rp528 triliun.(Mochamad Tjiptardjo:2009). Dan pernyataan lanjutan mengenai ketidakpatuhan wajib pajak juga ditunjukkan oleh pernyataan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan adanya tunggakan pajak yang

total nilai tunggakan pajak sampai dengan 17 Februari 2010 mencapai Rp 44 triliun, ini merupakan nilai tunggakan dari 1,8 juta wajib pajak. (M. Tjiptardjo : 2010).

Tunggakan pajak yang meningkat akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak karena jika dilihat dari penerimaan pajak, Dirjen pajak hanya menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp1,241 triliun. Jumlah sebesar itu masih jauh dari target pendapatan pajak yang direncanakan dari hasil pemeriksaan 2010. Untuk 2010 ditargetkan penerimaan pajak dari pemeriksaan sebesar Rp9 triliun. (Otto Endy Panjaitan:2010).

Dibawah ini adalah data mengenai perkembangan tunggakan pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas sebagai fenomena mengenai ketidakpatuhan pajak dilihat dari sudut tunggakan pajak.

Tabel 1.3
Perkembangan Tunggakan Pajak pada
KPP Pratama Bandung Cicadas Periode 2007 – 2009

Tahun	Penerbitan Surat Paksa	Penagihan dengan surat paksa	Pelunasan Tunggakan	Saldo Tunggakan	penerimaan
2007	528 ↓	4,010,359,398	1,639,016,060	89,130,563,536	534,000,000,000 ↑
2008	970 ↑	980,819,889	1,759,605,191	87,687,687,996	608,285,000,000 ↑
2009	725 ↓	9,064,698,012	610,951,196	111,606,064,674	540,226,000,000 ↓

Sumber : Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Cicadas(2010)

Tabel diatas memberikan gambaran tentang perkembangan penerbitan surat paksa, tunggakan pajak dan pencairan/ pelunasan pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas periode 2007 sampai dengan 2009. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi masalah dalam penagihan pajak dengan tunggakan yang

cenderung meningkat. Jika dilihat perubahan tunggakan pajak tiga tahun terakhir menunjukkan perubahan yang fluktuatif, dengan pelaksanaan penagihan menggunakan surat paksa yang cukup progresif. Namun masih perlu adanya peningkatan pada pelunasan atas tunggakan pajak yang tercatat pada seksi penagihan. Berdasarkan data di atas, dapat terlihat terdapat masalah atas jumlah tunggakan pajak yang tiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan.

Pada tahun 2008 terdapat kondisi dimana secara bersamaan penerbitan surat paksa mengalami peningkatan begitu juga penerimaan pajak mengalami peningkatkan Hal ini bertentangan dengan teori yang ada yaitu seharusnya apabila surat paksa meningkat maka penerimaan menurun ini dikarenakan jika surat paksa meningkat maka tunggakan pajak pun akan ikut meningkat sedangkan tunggakan pajak dapat menurunkan penerimaan pajak. Selain itu pada tahun 2009 penerbitan surat paksa menurun begitu juga penerimaan yang ikut menurun seharusnya jika surat paksa menurun maka penerimaan pajak peningkat ini dikarenakan jika jika surat paksa turun maka tunggakan pun ikut menurun.

Dari fenomena yang terjadi pada KPP diatas maka pada thn 2008 dan 2009 tidak sejalan dengan teori dari Waluyo (2009) yaitu jika Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang sangat besar ini dapat berdampak pada penurunan penerimaan pajak begitupun sebaliknya. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya yaitu dengan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dengan demikian diharapkan secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat.

Selain fenomena diatas menurut Rukhiyadin petugas salah satu KPP Bandung seksi Penagihan mengemukakan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi dalam proses penagihan pajak salah satunya yaitu wajib pajak yang mempunyai tunggakan tetapi tidak mau membayar utang pajaknya dan wajib pajak yang sudah tidak diketahui keberadaannya atau pindah tempat tinggal.selain itu Penagihan aktif yang dilakukan juga tidak efektif disebabkan juga secara teknis oleh surat-surat yang diterbitkan tidak sampai ke wajib pajak ini bisa disebabkan oleh 2 hal yaitu wajib pajak pindah rumah atau alamat wajib pajak tidak jelas. (Rukhiyadin:2011)

Berdasarkan fenomena, permasalahan, teori dan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas menunjukan bahwa proses penagihan pajak di beberapa KPP belum optimal hal ini dapat membuat penerimaan pajak menjadi berkurang. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul : **"Analisi Pengaruh Sistem Penagihan tunggakan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Wilayah Jawa Barat 1 ".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Saat ini masih terdapat masalah dalam penerimaan pajak yaitu Jumlah penerimaan negara dari sektor pajak belum mencapai tax ratio yang optimal, dengan tax ratio Indonesia 12% termasuk paling rendah

dibandingkan negara-negara tetangga ini disebabkan karena banyaknya tunggakan pajak sehingga penerimaan pun menjadi berkurang.

2. Pada saat penerbitan surat paksa meningkat seharusnya penerimaan pajak berkurang tetapi hal ini tidak sesuai pada salah atu KPP di kota bandung yaitu surat paksa meningkat penerimaan pajak pun meningkat. Dari kondisi ini dapat diprediksikan kemungkinan peningkatan penerimaan ini terjadi akibat ada factor lain yang dapat meningkatkan penerimaan pajak misalnya Produk Domestik Bruto, peningkatan jumalh wajib pajak, atau pun kepatuhan wajib pajak.
3. Tidak ada upaya penyelesaian dari wajib pajak setelah dilakukan langkah awal penagihan melalui surat teguran, surat paksa bayar hingga permintaan blokir rekening dan Penagihan aktif yang dilakukan juga tidak efektif disebabkan juga secara teknis oleh surat-surat yang diterbitkan tidak sampai ke wajib pajak ini dibisa disebabkan oleh 2 hal yaitu wajib pajak pindah rumah atau alamat wajib pajak tidak jelas.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dijelaskan pada latar belakang penelitian diatas dan kemudian diidentifikasikan pada sub bab identifikasi masalah, maka selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penagihan tunggakan pajak , surat paksa pajak dan penerimaan pajak di KPP Wilayah 1 Jawa Barat.

2. Seberapa besar pengaruh penagihan tunggakan pajak dan surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak baik secara simultan maupun parsial di KPP Wilayah 1 Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Untuk mengumpulkan data dari berbagai informasi tentang perkembangan pengaruh penagihan pajak dan surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan dan orang pribadi

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana prosedur penagihan tunggakan pajak, surat paksa dan penerimaan pajak Di KPP Wilayah 1 Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan tunggakan pajak dan surat paksa pajak terhadap penerimaan baik secara parsial mupun simultan di KPP Wilayah 1 Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1.4.1 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah informasi bagi instansi guna mengevalusi kembali tentang prosedur penagihan pajak dan surat paksa pajak. Selain itu juga untuk menanalisis perkembangan penerimaan pajak .

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis

   Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman yag lebih luas. Terutama mengenai pengaruh penagihan pajak dan surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan dan orang pribadi

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Hasil dari penelitian diharapkan dapat meningkatkan motivasi guna memiliki pengetahuan yang lebih luas dan dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang kelak akan membutuhkannya.

3. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

   Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan. Serta dapat dimanfaatkan sebagai informasi bagi rekan-rekan mahasiswa Program Studi Akuntansi dan pembaca pada umumnya dalam aplikasi teori dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di bangku kuliah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wilayah Kota Bandung, yaitu yang terdiri dari:

Tabel 1.4
Lokasi Penelitian

No	Nama KPP	Alamat
1	KPP Pratama Bandung Karees	Jalan Ibrahim Adjie No. 372
2	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jalan Soekarno Hatta No. 781
3	KPP Pratama Bandung Tegalega	Jalan Soekarno Hatta No. 216
4	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jalan Purnawarman No. 19-21
5	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Jalan Ir. Sutami No. 1

6	KPP Pratama Majalaya	Jalan peta bandung
7	KPP Pratama Cimahi	Jalan amir Mahmud no 517
8	KPP Pratama Soreang	Jalan cimareme
9	KPP Pratama Sumedang	Jalan Ibrahim Adjie No. 372
10	KPP Madya	Jalan asia afrika

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan mulai bulan April 2012 sampai dengan juni 2012

Tabel 1.5
Waktu Penelitian

No	Prosedur	Waktu				
		Maret 2012	April 2012	Mei 2012	Juni 2012	Juli 2012
I	**Persiapan Penelitian**					
	1. Bimbingan dengan dosen pembimbing	■	■	■	■	■
	2. Membuat outline dan proposal skripsi	■				
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi		■			
	1. Menentukan tempat penelitian		■			
II	**Tahap Pelaksanaan**					
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi		■			
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan		■			
	3. Penelitian		■			
	4. Penyusunan skripsi		■	■	■	
III	**Tahap pelaporan**					
	1. Menyiapkan draft skripsi					■
	2. Sidang akhir skripsi					■
	3. Penyempurnaan laporan skripsi					■
	4. Penggandaan skripsi					■